

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DESA LAHUMOKO KABUPATEN BUTON UTARA

Megi Prihatin^{*1}, Fariz Mustaqim²

^{1,2}.Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: megiprihatin89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan. Hal ini berarti variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara melalui uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ maka hipotesis H_a diterima.

Kata kunci : Akuntabilitas, Tingkat Kepercayaan, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of management and village accountability on the level of community trust in the village government in Lahumoko village, Kambowa sub district, north Buton regency. The research method used in this research is descriptive statistical analysis. Data collection method used in this study is to use the method of observation, questionnaires, interviews, and documentation. The sampling technique used by researchers is random sampling. The research results show that there is an influence between accountability and the level of trust. This means that the accountability variable has a significant effect on the level of public trust in Lahumoko Village, Kambowa District, North Buton Regency through the t test with a significance value of $0,007 < 0,05$, the H_a hypothesis is accepted.

Keywords: accountability, level of confidence, management of village funds

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan diatas maka, sejalan dengan yang dikemukakan oleh beberapa warga di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah terkait pelayanan setiap aspek lembaga atau aparat kurang konsisten sehingga menghambat jalannya pelayanan kantor Desa Lahumoko.

Beberapa warga juga mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan memang sudah lumayan meningkat terutama pada sektor pertanian dan transportasi. Tetapi ada beberapa pembangunan yang tidak mengenai sasaran yang tepat. Seperti pembangunan pasar yang tidak tepat sasaran.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) menjelaskan tentang pengaruh akuntansi dan transparansi pemerintah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan transparansi pemerintah daerah mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Adapun penelitian dilakukan oleh Karamoy (2017) dengan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan di Kecamatan Kotamobagu Selatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif. Dalam laporan dan pertanggungjawab sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala sama sehingga dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Widiyanti (2017) akuntabilitas adalah keharusan lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sugiyono, 2013).

Pengertian akuntabilitas adalah sebagai suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada diluar tanggung jawabnya. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabannya kepada pihak pemberi

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Karamoy, 2017).

2.1.1. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang berwujud laporan anggaran. Laporan anggaran yang disusun oleh pemerintah desa diantaranya berupa laporan kas umum, laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban desa, surat pertanggungjawaban, penyusunan laporan anggaran tersebut bermanfaat untuk gambaran perkiraan untuk anggaran di masa yang akan datang (Setiawan, 2015) dalam Albugis, 2016).

Berikut ini beberapa manfaat penerapan akuntabilitas (Waluyo dalam Albugis, 2016) antara lain:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Albugis (2016) mengemukakan bahwa manfaat dari akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut manfaat dari akuntabilitas:

1. Menjadikan instansi pemerintah akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.1.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Bolang (2014) terdapat beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, yaitu:

1. Setiap penyelenggara pemerintah eksekutif harus memiliki rincian tugas dan kinerja yang jelas dan dapat diukur.
2. Setiap penyelenggara pemerintahan harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dan lembaga yang dipimpinnya setahun sekali.
3. Pelaksanaan tugas dan laporan pertanggungjawaban harus dinilain oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prosedur operasi yang diumumkan secara terbuka.

2.1.3. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Widiyanti (2017), akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

2.1.4. Aspek Akuntabilitas

Menurut Widiyanti (2017) dalam akuntabilitas terdapat lima aspek penting, yaitu:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*accountability is a relationship*). Dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan akan bertanggungjawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam prinsip akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*accountability is result oriented*). Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggungjawab, adil dan inovatif. Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dalam institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi guna mencapai usaha yang diharapkan.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*accountability requires reporting*). Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Dari adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu institusi, serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya. Dalam dunia birokrasi bentuk akuntabilitas setiap individunya akan berwujud laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sementara dalam institut wujud laporannya disebut LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*accountability is meaningless without consequences*). Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggungjawab, dan tanggungjawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*accountability improves performance*). Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas dalam memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi. Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), sehingga akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi guna meningkatkan kinerjanya.

2.1.5. Dimensi Akuntabilitas Publik

Dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh para lembaga publik antara lain menurut *Hoopwood* dan *Tamkins* dalam *Widiyanti* (2017) yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum

dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perhindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menurut penegakan hukum. Sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan administrasi.

2. Akuntabilitas proses (*proses accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang sudah melaksanakan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive dan murah biayanya.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan perimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang mermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dengan membuat kebijakan harus mempertimbangkan 1) Apa tujuan kebijakan tersebut, 2) Mengapa kebijakan itu diambil, 3) Siapa sasarannya, 4) Pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan 5) Dampak (negative) akan kebijakan tersebut.

2.1.6. Tingkatan dalam Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki lima tingkatan yang berbeda-beda dan perlu kita ketahui (Rahmawati, 2013) antara lain:

1. Akuntabilitas personal (*personal accountability*). Dalam tingkatan ini yakni akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Pribadi yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.
2. Akuntabilitas individu. Dalam tingkatan akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu (yang diberikan tanggung jawab) dengan lingkungan kerjanya. Misalnya,

hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Selaku instansi pemberi kewenangan, harus bertanggungjawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta menghilangkan adanya hambatan kerja. Sementara Pegawai Negeri Sipil selaku individu yang diberi tanggungjawab harus melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

3. Akuntabilitas kelompok. Dalam tingkatan akuntabilitas kelompok ini kinerja pada sebuah institusi biasanya dilaksanakan atas dasar kerja sama kelompok. Dalam hal ini tidak bisa disebut dengan istilah “saya”, tetapi yang ada adalah “kami” dalam proses melaksanakan kerjanya. Dalam akuntabilitas tingkat ini pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antara berbagai kelompok lain dalam institusi tersebut, memainkan peranan yang penting guna mencapai kinerja organisasi (tujuan) yang diharapkan.
4. Akuntabilitas organisasi. Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya.
5. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kerjanya. Dalam tingkatan akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermatabat.

2.1.7. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia

Proses akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas. Di negara Indonesia, alat akuntabilitas ada beberapa (Widiyanti, 2017) yakni:

1. Perencanaan strategis (strategic plan) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Daerah), Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Daerah), dan lain-lain.
2. Kontrak kinerja. Contohnya pada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kontrak kerja ini berisi kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung.
3. Laporan kinerja yang berupa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, dengan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

2.1.8. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu (Oktavia, 2020):

1. Proses pembuatan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang benar.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
6. Transparansi.

2.2. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah program untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat, bahwa dana itu harus mengalir ke Desa karena selama ini hanya masyarakat kota yang menikmati, sementara masyarakat desa dan kekayaan alamnya dikuras sampai jauh ke dalam dan kurang dinikmati olehnya. Kebijakan pemerintah pusat melalui adanya dana desa ini adalah pantas karena sebuah tuntutan dan harapan akan adanya keadilan dalam masyarakat (Muhiddin, 2017).

2.2.1. Sumber Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2.2.3. Prioritas Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa diprioritas untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

2.2.4. Pengelolaan Dana Desa

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan keuangan desa didasari atas asas-asas akuntabilitas, transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.3. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah perilaku individu yang mengharapkan agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang percaya akan memberikan manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama (Tsalis dalam Rahmawati, 2017).

2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk kepercayaan menurut Rahmawati (2013) yaitu:

1. Kemampuan. Kepercayaan adalah rana khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperlihatkan performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. Kemampuan dapat meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
2. Integritas. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai dari seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Integritas dapat dilihat dari sudut kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, keterus-terangan, keterkaitan dan kehandalan.
3. Kebaikan hati. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut. Kebaikan hati meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

2.3.2. Dimensi Kepercayaan

Rahmawati (2013) mengidentifikasi ada lima dimensi yang merupakan kunci yang melandasi konsep kepercayaan, yaitu:

1. Integritas. Integritas merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi yang tampak paling penting ketika seorang menilai sifat dapat dipercaya atas pihak lain. Tanpa pemahaman akan karakter moral dan kejujuran dasar orang lain dimensi kepercayaan lain tidak ada artinya.
2. Kompetensi. Mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Anda tidak mungkin mendengarkan atau mengendalkan seseorang yang kemampuannya tidak anda hormati. Anda harus mempercayai orang itu mempunyai keterampilan dan kemampuan apa yang ia katakan dilakukannya.
3. Konsistensi. Konsistensi terkait dengan kehandalan, prediktabilitas dan pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidak sesuaian antara kata-kata dan tindakan dapat mengikis kepercayaan.
4. Loyalitas. Adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa anda tidak dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak oportunistis.
5. Keterbukaan. Dengan keterbukaan kita dapat saling berbagi dan saling mengandalkan antara sesama individu maupun kelompok.

2.3.3. Indikator Kepercayaan Masyarakat

Terdapat empat elemen yang diperlukan untuk kepercayaan seseorang terhadap organisasi (Oktavia, 2020), seperti dijelaskan berikut ini.

1. *Exhibiting Trust*. Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.
2. *Achieving Result*. Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibakan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu mempertimbangkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

3. *Acting with integrity*. Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi, yang harus dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:
 - a. Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui.
 - b. Perkataan harus sesuai dengan perilaku.
 - c. Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi.
 - d. Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu.
4. *Demonstrating concern*. Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu organisasi tersebut mau mendengar dan menanggapi kepentingannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Lahumoko yang berjumlah sebanyak 214 Kartu Keluarga.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti apabila peneliti yang di mana setiap orang dari seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih (Oktavia, 2020)

3.2. Jenis dan sumber data

3.2.1. Jenis data

Data kualitatif, adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata yang diolah secara deskripsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya upaya membangun pandangan mereka yang teliti dan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambar holistik dan rumit (Sugiyono, 2013). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data yang bukan merupakan angka-angka seperti sejarah kota/desa dan struktur organisasi.

Data kuantitatif, adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Data kuantitatif dari penelitian ini adalah hasil jawaban responden.

3.2.2. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang diteliti. Adapun data primer dari penelitian ini adalah data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan hasil kuesioner kepada masyarakat Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak diluar sasaran penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari literatur dan dokumen yang diambil dari kantor Desa Lahumoko, referensi/buku, literatur, jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan melakukan pengamatan
- b. Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data.
- c. Wawancara adalah interaksi antara dua pihak individu ke individu tidak lebih dari dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancara.
- d. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumentasi juga dapat didefinisikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, gunting koran dan bahan referensi lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program SPSS dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan r product moment, yaitu menentukan $\alpha = 0,05$ kemudian $n = 68$ sehingga didapat nilai r tabel sebesar 0,244. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan, apabila r hitung $>$ r tabel = Valid dan r hitung $<$ r tabel = Tidak Valid. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X

Pernyataan	Corrected item total correlation (r-hitung)	r-tabel	Validitas
1	0,481	0,244	Valid
2	0,607	0,244	Valid
3	0,421	0,244	Valid
4	0,500	0,244	Valid
5	0,541	0,244	Valid
6	0,593	0,244	Valid
7	0,527	0,244	Valid
8	0,517	0,244	Valid
9	0,410	0,244	Valid
10	0,468	0,244	Valid
11	0,311	0,244	Valid
12	0,462	0,244	Valid
13	0,361	0,244	Valid
14	0,348	0,244	Valid
15	0,399	0,244	Valid
16	0,370	0,244	Valid
17	0,321	0,244	Valid
18	0,510	0,244	Valid
19	0,380	0,244	Valid
20	0,428	0,244	Valid

Sumber : sumber data diolah 2022.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pernyataan	Corrected item total correlation (r-hitung)	r-tabel	Validitas
1	0,517	0,244	Valid
2	0,446	0,244	Valid
3	0,419	0,244	Valid

4	0,33	0,244	Valid
5	0,541	0,244	Valid
6	0,370	0,244	Valid
7	0,417	0,244	Valid
8	0,292	0,244	Valid
9	0,285	0,244	Valid
10	0,314	0,244	Valid
11	0,414	0,244	Valid
12	0,308	0,244	Valid
13	0,574	0,244	Valid
14	0,461	0,244	Valid
15	0,416	0,244	Valid
16	0,476	0,244	Valid
17	0,619	0,244	Valid
18	0,253	0,244	Valid
19	0,379	0,244	Valid
20	0,415	0,244	Valid

Sumber : sumber data diolah 2022.

Tabel di atas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabe terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan dinyatakan valid.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Reliability yang tinggi ditunjukkan dengan nilai r_{xx} mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliability yang dianggap sudah cukup memuaskan jika cronbach's alpha $\geq 0,70$. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas	0,790	0,70	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0,706	0,70	Reliabel

Sumber : sumber data diolah 2022.

4.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui *Kolmogorov-Sirnov* > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
X	.086	68	.200*	.982	68	.430
Y	.104	68	.071	.977	68	.262

*. This is a lower bound of the true significance.
 a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : sumber data diolah 2022.

Dari tabel di atas, pada kolom Signifikansi (Sig.) Diperoleh nilai lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel terdistribusi normal dan layak dilanjutkan untuk dilakukan pengujian kualitas data selanjutnya.

4.1.4. Uji Multikolenearitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolenearitas yaitu dengan menggunakan Tolerance dan Variance Infation Factor (VIF). Uji multikolenearitas yaitu dengan menggunakan Tolerance dan Variance Infation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolenearitas. Hasil uji multikolenearitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Multikolenearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleran ce	VIF
1	(Constant)	63.557	7.831		8.116	.000		
	AKUNTA BILITAS	.261	.094	.326	2.785	.007	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TINGKAT KEPERCAYAAN

Sumber : sumber data diolah 2022.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 5 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolenearitas antar variabel independen.

4.1.5. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah dengan metode Spearman's Rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.554	4.454		3.941	.000		
	AKUNTABILITAS	-.165	.053	-.358	-3.092	.003	1.000	1.000

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : sumber data diolah 2022.

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi dari variabel akuntabilitas menunjukkan nilai 0,003. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R Square (R²) untuk mengetahui seberapa besar perseentase kontribusi variabel akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.326 ^a	.107	.093	4.890

Sumber : sumber data diolah 2022.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,107 atau 10,7% maka disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang simultan terhadap nilai perusahaan sebesar 10,7% dan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dan tingkat kepercayaan. Hal ini berarti variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat desa di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

Pengaruh signifikan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh besarnya peran indikator yang membentuk yaitu (1) pembuatan keputusan ditulis secara tertulis, (2) akurasi kelengkapan informasi, (3) kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan, (4) penyebar luasan informasi melalui media masa dan akses publik, (5) sistem informasi manajemen dan monitoring hasil, (6) transparansi, (7) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (8) akuntabilitas proses, (9) akuntabilitas program, dan (10) akuntabilitas kebijakan. Dari indikator-indikator yang membentuk variabel akuntabilitas pengelolaan (X) tersebut, maka indikator pembentuk utama variabel akuntabilitas pengelolaan (X) adalah indikator akuntabilitas program, kemudian diikuti indikator sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Sedangkan indikator-indikator yang lain memberikan proporsi kecil dalam membentuk variabel akuntabilitas pengelolaan (X).

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan merupakan faktor penting dalam peningkatan tingkat kepercayaan pada masyarakat desa di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan perlu ditingkatkan terutama pada indikator pembentuknya agar tingkat kepercayaan masyarakat dapat dimaksimalkan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada masyarakat desa di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, yang berarti semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara melalui uji t, dengan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ maka hipotesis diterima.

6. SARAN

Untuk Pemerintah Desa di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara sudah melakukan prinsip akuntabilitas dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di papan informasi kantor desa dan saran peneliti agar disetiap pelanggaran pemerintah desa cepat dalam memberikan informasi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Desa. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cara menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, Fabriana F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 2, September 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13394/12978>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022.
- Bolang, Jeane. 2014. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (application Of Accountability And Transparency In the Implementation Of Good Governance). *Jurnal Societatis*. Vol. 2, No. 9, Desember 2014. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6385>. Diakses tanggal 28 Juli 2022
- Karamoy, Herman. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Muhiddin, Amir. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa). *Skripsi. Universitas Negeri Makassar*.
- Oktavia, Norni. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Rahmawati, N. E. 2013. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder. *Tesis. Universitas Gadjah Mada*.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.